

PENGARUH DEWAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE* (ESG): STUDI PADA PERUSAHAAN ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024

Refalina Aprilia¹⁾, Tri Darma Rosmala Sari²⁾,

Email: refalinaap@gmail.com.¹⁾, Email: tridarma_rosmalasari@teknokrat.ac.id.²⁾

^{1), 2)} Akuntansi, Universitas Teknokrat Indonesia

Jl. H.ZA Pagaralam, No 9-11, Labuhanratu, Bandar Lampung

Abstract

Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure is increasingly becoming a global concern as a form of corporate transparency and accountability on sustainability issues, especially in the energy sector, which contributes significantly to carbon emissions and has a significant social and governance impact. This study aims to analyze the influence of the board of directors and audit committee on ESG disclosure in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2022–2024. The study uses a quantitative method with data analysis using panel data regression, involving 58 energy companies selected through purposive sampling. The results of this study indicate that the size of the board of directors, the size of the audit committee, and the frequency of audit committee meetings have a positive and significant effect on ESG disclosure, while the independent board of directors and the gender of the board of directors have no effect on ESG disclosure. The results of this study are expected to contribute to the development of corporate governance literature and serve as a consideration for energy companies in Indonesia in strengthening transparency and sustainability accountability.

Keywords: Board of Directors, Audit Committee, Environmental, Social, and Governance Disclosure

Abstrak

Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi perhatian global sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap isu keberlanjutan, terutama pada sektor energi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi karbon serta dampak sosial dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi panel data, melibatkan 58 perusahaan energi yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG, sedangkan dewan direksi yang independen dan gender dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola perusahaan serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan energi di Indonesia dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan.

Kata kunci: Dewan Direksi, Komite Audit, Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

1. Pendahuluan

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin dipahami sebagai instrumen strategis yang mencerminkan tingkat keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai dampak kebijakan dan aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan [1]. Praktik pengungkapan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi non-keuangan, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan dalam merespons tuntutan keberlanjutan yang terus berkembang seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk tidak lagi berorientasi

semata pada pencapaian kinerja finansial, melainkan juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan data dari [2] mencatat bahwa lebih dari 80% investor institusional global kini mempertimbangkan faktor ESG dalam keputusan investasi, dengan aset kelolaan berbasis ESG mencapai US\$35 triliun pada tahun 2022, mencerminkan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini semakin relevan bagi sektor energi, yang berkontribusi sekitar 73% terhadap total emisi gas rumah kaca global [3] dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil, sehingga pengungkapan ESG menjadi krusial dalam mengurangi risiko transisi energi sekaligus memenuhi tuntutan regulasi internasional, termasuk komitmen dalam *Paris Agreement* [4].

Indonesia sebagai salah satu kontribusi energi terbesar di Asia Tenggara, pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mulai memperoleh momentum seiring dengan diberlakukannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan [5]. Statistik Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa hingga akhir 2024 sebanyak 882 perusahaan telah menerbitkan *Sustainability Report*, meningkat signifikan dari 2022 dengan tingkat adopsi mencapai 88% dan rata-rata pertumbuhan sekitar 15% per tahun. Sektor energi di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam agenda keberlanjutan nasional karena tingginya kontribusinya terhadap emisi karbon dan ketergantungannya pada sumber energi fosil. Sektor energi yang mencakup minyak, gas, dan listrik masih menunjukkan keterbatasan, di mana hanya sekitar 60% perusahaan energi yang mengungkapkan indikator ESG secara lengkap pada 2023 [4]. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 serta menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon [6]. Namun, realisasi bauran energi terbarukan hingga saat ini masih berada di kisaran 12-13%, menunjukkan tantangan signifikan dalam percepatan transisi energi [7]. Kondisi ini kontras dengan tekanan global yang semakin kuat, mengingat sektor energi memiliki kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yaitu karakteristik dewan direksi dan komite audit yang dimana memiliki peranan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Karakteristik tersebut meliputi, ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi, keberagaman *gender* dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan membuat keputusan, termasuk dalam hal pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh [8] dan [9] yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi dengan jumlah anggota dewan yang lebih besar diyakini sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi penelitian yang dilakukan oleh [10] dan [11] menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Pada komposisi dewan direksi penelitian yang dilakukan [12] dan [13] menemukan bahwa dewan direksi yang memiliki proporsi independen lebih tinggi cenderung mendorong transparansi dalam pengungkapan ESG, tetapi penelitian yang dilakukan oleh [14] menemukan bahwa komposisi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Temuan yang dilakukan oleh [15] menemukan bahwa keberagaman *gender* dewan direksi diyakini mendorong transparansi dan kinerja keberlanjutan. Ukuran komite audit merujuk

pada jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit perusahaan, dan merupakan salah satu aspek struktural penting dalam tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh [16] dan [17] menemukan bahwa Keberadaan komite audit dengan jumlah anggota yang memadai diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, tidak hanya terkait dengan pelaporan keuangan, tetapi juga pelaporan non-keuangan, termasuk pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sementara temuan yang dilakukan oleh [18] menemukan bahwa ukuran komite tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Selanjutnya, Frekuensi rapat komite audit mengacu pada jumlah pertemuan yang diadakan oleh komite audit dalam satu periode pelaporan biasanya dalam setahun dan mencerminkan tingkat aktivitas serta kecermatan komite dalam menjalankan perannya sebagai pengawas penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan seperti ESG (*Environmental, Social, Governance*) disclosure. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [19] dan [20] menemukan bahwa bahwa frekuensi rapat komite audit berperan sebagai pemicu transparansi keberlanjutan, karena pengungkapan ESG berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan intensitas rapat dengan peningkatan nilai perusahaan. Semakin sering komite audit bertemu, semakin besar peluang isu ESG dibahas secara serius, sehingga meningkatkan kualitas dan komprehensifitas pengungkapan keberlanjutan. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian [21] yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang perlu diteliti lebih lanjut.

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* diperkenalkan oleh Freeman pada tahun 1984, yang menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemegang saham, melainkan juga terhadap keseluruhan pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk masyarakat, lingkungan, dan *stakeholder* lainnya yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas bisnis [22]. Menurut teori ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi para *stakeholder* guna mempertahankan dukungan perusahaan dan memastikan keberlangsungan operasional perusahaan dalam periode yang lama. Pengungkapan ESG menjadi salah satu bentuk tanggapan perusahaan terhadap tuntutan *stakeholder* yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Struktur dewan, yang mencakup ukuran dewan, independensi dewan, dan keberagaman *gender* dewan, dapat memengaruhi tingkat sensitivitas perusahaan dalam merespons tekanan dari *stakeholder* [23]. Selain itu juga, struktur komite audit yang mencakup ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik manajemen sehingga mendorong pengungkapan ESG yang lebih luas sesuai dengan tuntutan *stakeholder* [24].

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada kesesuaian antara sistem nilai perusahaan dan masyarakat, serta tujuan perusahaan dalam memenuhi harapan sosial [25]. Menurut teori ini, masyarakat memberikan wewenang kepada perusahaan untuk memiliki dan menggunakan sumber daya serta mempekerjakan karyawannya [26]. Oleh karena itu, jika terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai perusahaan dan masyarakat, maka masyarakat akan menganggap bahwa perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Dalam konteks ini, teori legitimasi menegaskan bahwa pengungkapan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi instrumen penting bagi perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi di mata publik. Melalui pengungkapan ESG, perusahaan berupaya menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya sejalan dengan norma sosial, nilai etika, dan ekspektasi masyarakat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengungkapan ESG bukan hanya bentuk transparansi, tetapi juga strategi simbolik dan substantif untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan [27];[28]. Karakteristik tata kelola perusahaan, seperti efektivitas komite audit dan struktur dewan direksi, turut memengaruhi sejauh mana perusahaan mampu mengelola legitimasi sosialnya melalui pengungkapan ESG. Komite audit yang aktif tercermin dari frekuensi rapat yang tinggi dapat memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan bahwa pelaporan keberlanjutan disusun sesuai dengan standar etika dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya aktivitas pengawasan tersebut, manajemen terdorong untuk mengungkapkan informasi ESG secara lebih luas dan kredibel sebagai upaya mempertahankan legitimasi perusahaan di hadapan publik dan regulator [29]; [30].

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Pengungkapan ESG merupakan instrumen untuk menilai sejauh mana perusahaan menginformasikan dampak dari pelaksanaan kebijakan dan tindakan terkait aspek ESG yang dijalankan di perusahaan [1]. Aspek lingkungan mencerminkan interaksi perusahaan dengan lingkungan fisik. Hal ini mendorong meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan alam [31]. Berikutnya, aspek sosial berkaitan dengan pengaruh aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, termasuk perlindungan hak konsumen, permasalahan hukum, hak asasi manusia, keberagaman dan inklusi, keselamatan serta kesehatan kerja, sistem remunerasi yang adil, dan pemberian kesempatan yang setara [32]. Terakhir, aspek tata kelola berkaitan dengan mekanisme pengelolaan perusahaan, mencakup keberagaman dalam susunan dewan, frekuensi rapat dewan, keberadaan komite, penerapan etika bisnis, serta upaya pencegahan terhadap tindakan kecurangan [33].

Hipotesis Penelitian

Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi merujuk pada jumlah anggota yang duduk dalam struktur pengambil keputusan tertinggi di

perusahaan, dan mencerminkan kapasitas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan strategis serta fungsional dalam pengawasan korporasi [34]. Hal ini dibuktikan oleh teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi, dimana dewan direksi memegang peranan penting dalam memastikan perusahaan dapat memenuhi harapan berbagai pihak, termasuk investor, masyarakat, regulator, dan pelanggan, terkait transparansi pengungkapan ESG dan memperoleh legitimasi di hadapan publik. Hal ini juga di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [35] mengindikasikan bahwa terdapat keterkaitan yang positif dan signifikansi secara statistik dalam karakteristik dewan direksi dengan pengungkapan ESG.

H1: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ESG

Komposisi Dewan Direksi

Komposisi dewan direksi merujuk pada proporsi anggota dewan independen (*independent directors*) dalam struktur dewan direksi yang memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk keanggotaan direksi internal dan independen. Komposisi dewan direksi memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan, karena dewan direksi yang terdiri dari anggota dengan keberagaman keahlian dan perspektif dianggap lebih mampu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif [36]. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi menunjukkan bahwa dewan direksi independen seharusnya mewakili kepentingan *stakeholder* dan mendorong perusahaan lebih transparan terhadap pengungkapan ESG dan memperoleh legitimasi di mata publik karena dalam aktivitasnya sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi publik. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh [13] mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif dalam independensi dewan yang lebih tinggi terhadap pengungkapan ESG.

H2: Komposisi Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ESG

Keberagaman Gender Dewan Direksi

Keberagaman *gender* dalam dewan direksi merujuk pada proporsi keterwakilan perempuan di antara anggota dewan, yang mencerminkan inklusivitas dan perspektif beragam dalam proses pengambilan keputusan strategis [37]. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi, bahwa keberagaman *gender* memperkaya dewan direksi melalui berbagai sudut pandang. Selain itu, keberagaman ini meningkatkan akses terhadap sumber daya eksternal yang relevan. Kehadiran perempuan di dewan direksi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh legitimasi publik. Hal ini juga sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh [15] mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan positif dalam keberagaman *gender* dewan mengenai pengungkapan ESG.

H3: Keberagaman Gender Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ESG

Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merujuk pada jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit perusahaan, dan merupakan elemen struktur tata kelola penting untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan non- keuangan seperti ESG. Dalam konteks ESG, hal ini menjadi penting karena pengungkapan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kinerja keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran ukuran komite audit menggunakan total anggota komite audit yang mengacu pada penelitian [38].

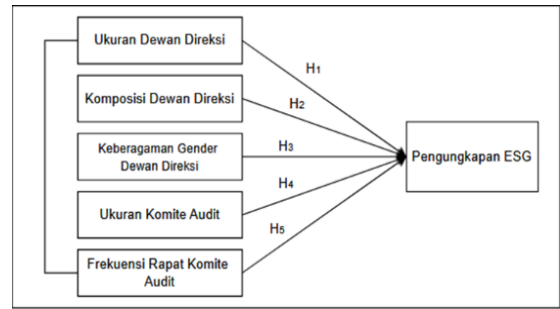
Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi yang menekankan bahwa keberadaan komite audit dengan jumlah anggota yang lebih besar berpotensi memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen, sehingga peningkatan kualitas pengawasan ini pada akhirnya mendorong perusahaan untuk menyajikan pengungkapan ESG yang lebih komprehensif, sesuai dengan harapan dan tuntutan pemangku kepentingan dan dengan ukuran komite audit yang lebih besar dapat memperkuat perusahaan dalam mengungkapkan ESG guna mempertahankan legitimasi di mata publik. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian [39] yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ESG di perusahaan-perusahaan di Indonesia.

H4: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ESG

Frekuensi Rapat Komite Audit

Mekanisme tata kelola perusahaan seperti komite audit dipandang penting untuk mengurangi asimetri informasi dan potensi perilaku oportunistik manajemen terhadap pemegang saham [40]. Salah satu dimensi yang dapat mencerminkan efektivitas komite audit adalah frekuensi rapat yang dilakukan. Rapat yang lebih sering menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pengawasan, sehingga mampu memperkuat fungsi monitoring terhadap kebijakan dan praktik pelaporan perusahaan [29]. Hal ini dibuktikan oleh teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi yang menunjukkan bahwa semakin sering rapat dilakukan dapat mencerminkan intensitas pengawasan yang lebih kuat, sehingga meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi ESG secara lebih komprehensif sebagai bentuk respons terhadap tuntutan pemangku kepentingan dan mempertahankan legitimasinya di mata publik. Hal ini juga sesuai oleh penelitian [20] yang menunjukkan bahwa intensitas rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.

H5: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ESG



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian kausal, dimana fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis dan membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat antara variabel independen dan variabel dependen [41]. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari informasi yang dapat diukur secara objektif, seperti ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi, keberagaman *gender* dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Variabel-variabel tersebut di uji untuk mengetahui seberapa jauh pengaruhnya terhadap pengungkapan ESG. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Data ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan- perusahaan sektor energi yang dipublikasikan di situs web resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Alat analisis menggunakan *Software Eviews* versi 12 untuk melakukan regresi data panel. Teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang dijelaskan pada Tabel 1.

Table 1. Sampel Penelitian berdasarkan Kriteria

No	Keterangan	Total
1	Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024	91
2	Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara konsisten di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024	(26)
3	Perusahaan dengan data yang tidak dapat digunakan karena mengandung nilai ekstrem yang dapat mempengaruhi hasil analisis	(7)
Jumlah Perusahaan yang terpilih sebagai Sampel Penelitian		58
Jumlah Data Observasi Penelitian (58 x 3 tahun)		174

Dari keseluruhan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2022-2024, terdapat 58 perusahaan yang lolos seleksi sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel penelitian ini sebesar $58 \times 3 = 174$ sampel.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pengungkapan ESG diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan berupa *nominal scale* yang dikembangkan oleh [42], [43] dan [44] yang terbagi menjadi tiga kategori besar yaitu *environmental disclosure*, *social disclosure*, dan *governance disclosure* dengan total item sebanyak 45. Perusahaan yang mengungkapkan ESG sesuai dengan

indeks pengungkapan ESG tersebut diberi skor “1”, sedangkan yang tidak mengungkapkan diberi skor “0”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Ukuran dewan direksi diukur menggunakan total anggota dewan direksi yang merujuk pada penelitian [38]. Komposisi dewan direksi diukur dengan membagi direksi independen dengan total dewan direksi yang mengacu pada penelitian [45]. Keberagaman *gender* dewan direksi diukur dengan membagi jumlah dewan direksi perempuan dengan total dewan direksi yang mengacu pada penelitian [8]. Pengukuran ukuran komite audit menggunakan total anggota komite audit yang mengacu pada penelitian [38]. Frekuensi rapat komite audit diukur menggunakan total rapat komite audit per tahun yang merujuk pada penelitian [45]. Di Indonesia, sejalan dengan Pasal 13 POJK No. 55/2015 yang mengatur bahwa komite audit diharuskan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

Model Regresi

Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi dari dua jenis data tersebut. Data *time series* digunakan karena penelitian ini mencakup periode pengamatan selama tiga tahun, yaitu 2022–2024, sementara data *cross-sectional* diterapkan karena melibatkan sejumlah perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian. Model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Pengungkapan ESG
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Ukuran Dewan Direksi
- X2 = Komposisi Dewan Direksi
- X3 = *Gender* Dewan Direksi
- X4 = Ukuran Komite Audit
- X5 = Frekuensi Rapat Komite Audit
- ϵ = *Error Term*

4. Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah langkah awal yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum memasuki tahap pengujian lanjutan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan serta terbebas dari penyimpangan yang dapat memengaruhi hasil analisis. Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini berjumlah 174 observasi. Tabel berikut menyajikan hasil analisis statistik deskriptif, meliputi mean, median, maximum, minimum, serta standar deviasi untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ESG (Y)	Ukuran Dewan (X1)	Dewan Direksi Independen (X2)	Gender Dewan Direksi (X3)	Ukuran Komite Audit (X4)	Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)
Mean	0.904734	3.959770	0.022471	0.125747	3.126437	6.080460
Median	0.955600	4.000000	0.000000	0.000000	3.000000	5.000000
Maximum	10.000000	10.000000	0.330000	0.670000	6.000000	32.000000
Minimum	0.533300	2.000000	0.000000	0.000000	2.000000	0.000000
Std. Dev	0.111944	1.559454	0.075923	0.178213	0.476126	4.314831
Observations	174	174	174	174	174	174

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji statistik deskriptif, variabel ESG (Y) memiliki nilai mean sebesar 0,9047 dan median 0,9556, yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ESG perusahaan sampel relatif tinggi. Nilai minimum 0,5333 dan maksimum 1,0000 mengindikasikan adanya variasi antarperusahaan, namun standar deviasi yang kecil (0,1119) menunjukkan data yang cukup homogen. Variabel Ukuran Dewan Direksi (X1) memiliki rata-rata 3,9598 dengan median 4,0000, yang berarti sebagian besar perusahaan memiliki sekitar empat anggota dewan. Rentang nilai 2,0000 hingga 10,0000 menunjukkan adanya variasi, dengan standar deviasi 1,5594 yang mencerminkan variasi moderat. Pada variabel Dewan Direksi Independen (X2), nilai mean sebesar 0,0224 dan median 0,0000 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit direksi independen. Nilai maksimum 0,3300 menunjukkan proporsi tertinggi sebesar 33%, dengan standar deviasi rendah 0,0759 yang menandakan variasi kecil dan kecenderungan homogen serta rendah. Variabel *Gender* Dewan Direksi (X3) memiliki mean 0,1257, yang menunjukkan proporsi perempuan sebesar 12,57%. Median 0,0000 mengindikasikan mayoritas perusahaan tidak memiliki direksi perempuan. Meskipun terdapat nilai maksimum 0,6700, standar deviasi 0,1782 menunjukkan variasi sedang antarperusahaan. Ukuran Komite Audit (X4) memiliki mean 3,1264 dan median 3,0000, yang menunjukkan sebagian besar perusahaan memiliki tiga anggota komite audit. Rentang 2,0000 hingga 6,0000 serta standar deviasi rendah 0,4761 menandakan ukuran komite audit relatif seragam. Terakhir, Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) memiliki mean 6,0805, yang menunjukkan rata-rata enam kali rapat per tahun. Median sebesar 5,0000 serta rentang 2,000 hingga 32,000 mencerminkan variasi yang cukup besar, didukung oleh standar deviasi 4,3148 yang menunjukkan tingkat variasi relatif tinggi antarperusahaan.

Pengujian Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan model, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob.
Cross-section F	0.0000
Cross-section Chi-square	0.0000

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk Cross-section F sebesar 0,0000. Nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.1094

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,1094 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section
Breusch-Pagan	0.0000

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji *lagrange multiplier* (LM) Breusch- Pagan menunjukkan bahwa nilai Cross-section sebesar 0,0000 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji ini mengindikasikan *Random Effect Model* adalah model regresi data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
Ukuran Dewan Direksi (X1)	1.000000	-0.028447	0.181362	0.084740	0.365579
Dewan Direksi Independen (X2)	-0.028447	1.000000	-0.070476	-0.079050	-0.069248
Gender Dewan Direksi (X3)	-0.181365	-0.070476	1.000000	-0.124422	0.009843
Ukuran Komite Audit (X4)	0.084740	-0.079050	-0.124422	1.000000	-0.052812
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)	0.365579	-0.069248	0.009843	-0.052812	1.000000

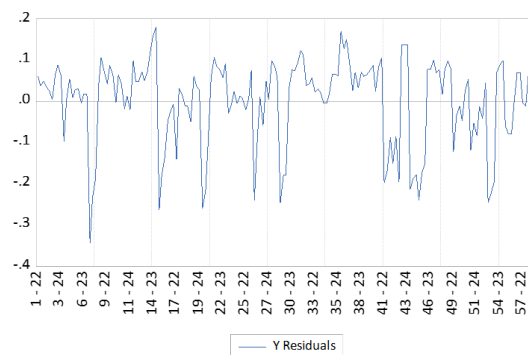
Berdasarkan Tabel 6 hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa seluruh variable independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi antar variable, dimana Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai sebesar 1,000000, Dewan Direksi Independen sebesar - 0,028447, Gender Dewan Direksi sebesar 0.181362, Ukuran Komite Audit sebesar 0.084740, dan Frekuensi Rapat Komite

Audit sebesar 0.365579 kelimanya berada < 0,85. **Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.
Ukuran Dewan Direksi	0.0664
Dewan Direksi Independen	0.0303
Gender Dewan Direksi	0.3664
Ukuran Komite Audit	0.0148
Frekuensi Rapat Komite Audit	0.0750

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas breusch-pagan-godfrey pada variable Dewan Direksi Independen (X2) dan Ukuran Komite Audit (X4) memiliki nilai < 0,05 yang menunjukkan bahwa mengalami gejala heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel Ukuran Dewan Direksi (X1), Gender dewan Direksi (X3), dan Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) memiliki nilai > 0,05 yang dapat disimpulkan ketiga variabel tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Dikarenakan ada dua variabel yang terjadi heteroskedastisitas, maka peneliti menggunakan alternatif pengujian lain yaitu uji heteroskedastisitas residual, untuk memastikan kestabilan varians pada model regresi.



Gambar 2. Grafik Residual

Berdasarkan Gambar 2 grafik residual uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa nilai residual berada antara rentang -3 hingga 2 dan tidak melampaui batas ±500. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Keterangan	Nilai
R-Squared	0.144887
Adjusted R-Squared	0.119438

Berdasarkan Tabel 8 nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,119438 yang menunjukkan bahwa kelima variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Ukuran Dewan Direksi (X1), Dewan Direksi Independen (X2), Gender Dewan Direksi (X3), Ukuran Komite Audit (X4), dan Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) mampu menjelaskan sebesar 11,94% variasi pada variabel Pengungkapan

ESG. Sementara itu, sisanya sebesar 88,06% dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar dari penelitian ini.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 9. Hasil Uji T

Variabel	t-Statistic	Prob.
Constanta	13.64619	0.0000
Ukuran Dewan Direksi (X1)	2.735454	0.0069
Dewan Direksi Independen (X2)	-1.768209	0.0788
Gender Dewan Direksi (X3)	0.535291	0.5932
Ukuran Komite Audit (X4)	3.164818	0.0018
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)	2.287429	0.0234

Ukuran Dewan Direksi (X1) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,735454 > t-tabel sebesar 1,97385 dengan nilai probabilitas 0,0069 < 0,05. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama (H1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.

Dewan Direksi Independen (X2) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -1,768209 < t-tabel sebesar 1,97385 dengan nilai probabilitas 0,0788 > 0,05. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedua (H2) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan direksi independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Gender Dewan Direksi (X3) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,535291 < t-tabel sebesar 1,97385 dengan nilai probabilitas 0,5932, > 0,05. Berdasarkan hasil ini, hipotesis ketiga (H3) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa gender dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Ukuran Komite Audit (X4) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 3,164818 > t-tabel sebesar 1,97385 dengan nilai probabilitas 0,0018 < 0,05. Berdasarkan hasil ini, menunjukkan hipotesis keempat (H4) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.

Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2.287429 > t-tabel sebesar 1,97385 dengan nilai probabilitas 0.0234 < 0,05. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kelima (H5) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,735454 dengan nilai probabilitas 0,0069 < 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Dengan demikian, jumlah anggota dewan direksi terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi ESG oleh perusahaan, di mana semakin besar jumlah anggota dewan direksi, semakin kuat fungsi pengawasan,

koordinasi, dan pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk memperluas transparansi terkait kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, keberagaman anggota dewan memungkinkan hadirnya berbagai perspektif yang dapat mendukung penerapan praktik keberlanjutan. Hasil ini juga sesuai dengan teori *stakeholder* dan teori legitimasi yang menyatakan bahwa dewan direksi dengan jumlah anggota yang lebih besar memungkinkan pengawasan yang lebih intensif dan komprehensif terhadap perusahaan, sehingga meningkatkan dorongan internal dalam mengungkapkan informasi ESG secara lebih luas guna memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder* dan memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian [35] dan [8] yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota dewan yang lebih besar cenderung mengungkapkan informasi ESG secara lebih luas sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan mempertahankan legitimasi perusahaan di mata publik.

Pengaruh Dewan Direksi Independen terhadap Pengungkapan ESG

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel dewan direksi independen memiliki nilai t-hitung sebesar -1,768209 dengan nilai probabilitas 0,0788 > 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak sehingga dewan direksi independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. Hasil ini, menunjukkan bahwa keberadaan dan proporsi anggota dewan direksi independen belum secara optimal mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder* dan teori legitimasi, yang berpendapat bahwa dewan direksi independen bertindak sebagai wakil kepentingan pemangku kepentingan dan mendorong perusahaan untuk lebih transparan terhadap pengungkapan informasi ESG dan perusahaan dapat memperoleh legitimasi di mata publik karena dalam aktivitasnya sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi publik. Namun dalam praktiknya, peran dewan direksi independen dalam perusahaan belum berjalan efektif dalam mewakili kepentingan *stakeholder* dan juga dalam hal ini perusahaan tidak selalu bergantung pada peran dewan direksi independen melainkan faktor lain seperti tuntutan regulasi, tekanan pasar, reputasi perusahaan, atau strategi komunikasi korporat mungkin lebih dominan mempengaruhi sejauh mana perusahaan mengungkapkan ESG. Temuan ini konsisten dengan penelitian [10] dan [14] yang menyimpulkan bahwa dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa peran dewan direksi independen dalam mendorong pengungkapan ESG masih lemah dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Independensi formal juga

tidak selalu mencerminkan kemampuan dean direksi untuk memberikan pengawasan substantif.

Pengaruh Gender Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *gender* dewan direksi memiliki nilai t-hitung sebesar 0,535291 dengan nilai probabilitas $0,5932 > 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak yang menyatakan *gender* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Hasil ini menunjukkan bahwa representasi gender dalam struktur dewan direksi belum memainkan peran yang signifikan sebagai faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan terkait transparansi pengungkapan ESG. Dengan kata lain, kehadiran perempuan di dewan direksi belum efektif dalam mendorong perusahaan untuk memperluas cakupan atau meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Temuan ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder* dan teori legitimasi, yang berpendapat keragaman *gender* di dewan direksi dapat memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta mendorong pengungkapan ESG yang lebih luas sebagai respons terhadap kepentingan *stakeholder* dan keterlibatan perempuan dalam dewan direksi dianggap sebagai strategi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan legitimasi perusahaan di mata publik. Namun dalam praktiknya, peran perempuan dalam struktur dewan direksi belum cukup kuat secara struktural maupun fungsional dalam pengambilan keputusan pengungkapan informasi ESG. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [46] dan [37] yang menyimpulkan bahwa representasi perempuan dalam dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. Temuan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam struktur dewan direksi masih bersifat simbolis dan belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan praktik pengungkapan ESG.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki nilai t-hitung sebesar 3,164818 dengan nilai probabilitas $0,0018 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang lebih besar umumnya memiliki kapasitas sumber daya yang lebih besar, keragaman keahlian, dan intensitas pengawasan yang lebih tinggi, sehingga lebih efektif dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan ESG. Temuan ini sejalan dengan teori *stakeholder* dan teori legitimasi, yang berpendapat bahwa perusahaan harus memenuhi informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, dan komite audit berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa

proses pengungkapan ESG dilakukan dengan akurat, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan guna mempertahankan legitimasi perusahaan di mata publik. Temuan ini sesuai dengan penelitian [16] dan [39] yang mengindikasikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota yang terlibat dalam komite audit, semakin optimal fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap praktik pengungkapan ESG perusahaan.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat komite audit memiliki nilai t-hitung sebesar 2,287429 dan nilai probabilitas $0,0234 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin sering komite audit melakukan rapat, semakin intens pengawasan, evaluasi serta monitoring terhadap proses pengungkapan ESG. Frekuensi rapat yang tinggi dapat membuat komite audit untuk lebih proaktif dan responsif dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dan risiko yang terkait dengan aspek keberlanjutan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan dalam kualitas dan kelengkapan pengungkapan ESG. Hasil ini sejalan dengan teori *stakeholder* dan teori legitimasi, yang berpendapat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang relevan, transparan dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Rapat komite audit yang lebih sering mencerminkan tingginya tingkat pengawasan kepada *stakeholder* menjadi lebih transparan dan dapat di pertanggungjawabkan guna mempertahankan legitimasi di mata publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [19] dan [20] yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan ESG. Komite audit yang sering melakukan rapat cenderung lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu terkait ESG, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengungkapannya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dirancang untuk secara empiris menganalisis pengaruh dari dimensi-dimensi tata kelola perusahaan, meliputi ukuran dewan direksi, proporsi dewan direksi independen, keragaman *gender* dalam dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2022–2024. Dengan menggunakan sampel 58 perusahaan energi. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan pada variabel ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG, hasil ini menunjukkan bahwa

hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi dengan jumlah yang lebih banyak dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengoptimalkan koordinasi, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mendorong pengungkapan ESG yang lebih luas. Variabel dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa peran dewan direksi independen tampaknya belum menjadi faktor pendorong yang kuat dalam meningkatkan transparansi pengungkapan ESG. Variabel *gender* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam dewan direksi belum mampu mendorong perusahaan untuk memperluas atau meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Variabel ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, semakin kuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap transparansi praktik pengungkapan ESG. Terakhir, variabel frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG, sehingga hipotesis kelima (H5) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, semakin kuat intensitas pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap proses pengungkapan ESG.

Daftar Pustaka

- [1] D. C. Broadstock, K. Chan, L. T. W. Cheng, and X. Wang, "The role of ESG performance during times of financial crisis: Evidence from COVID-19 in China," *Financ. Res. Lett.*, vol. 38, no. August 2020, p. 101716, 2021, doi: 10.1016/j.frl.2020.101716.
- [2] W. E. F. WEF, "Commitment to ESG Reporting is Driving Change within Global Corporations," World Economic Forum, Geneva, 2023. [Online]. Available: <https://www.weforum.org/press/2022/09/commitment-to-esg-reporting-is-driving-change-within-global-corporations-new-study-shows/>
- [3] I. P. on C. C. IPCC, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report," Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva, 2022. [Online]. Available: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>
- [4] A. A. Putri and V. S. Paramita, "The Effect of ESG Disclosure, Green Investment, and Carbon Emission Disclosure on the Value of Energy Companies in Indonesia: Analysis for the 2019-2023 Period," *Sinergi Int. J. Account. Tax.*, vol. 3, no. 1, pp. 16–33, 2025, doi: 10.61194/ijat.v3i1.406.
- [5] O. J. K. OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik," Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, 2017. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129651/peraturan-ojk-no-51poj032017-tahun-2017>
- [6] K. E. dan S. D. M. ESDM, "Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060," 2024. [Online]. Available: <https://ebtke.esdm.go.id>
- [7] I. E. dan S. D. IESR, "Menggapai Target 23% Bauran Energi Terbarukan 2025," 2024. [Online]. Available: <https://iesr.or.id>
- [8] Y. Nuhu and A. Alam, "Board characteristics and ESG disclosure in energy industry: evidence from emerging economies," *J. Financ. Report. Account.*, vol. 22, no. 1, pp. 7–28, 2024, doi: 10.1108/JFRA-02-2023-0107.
- [9] B. Gurol and V. Lagasio, "Women board members' impact on ESG disclosure with environment and social dimensions: Evidence from the European banking sector," *Soc. Responsib. J.*, vol. 19, no. 1, pp. 211–228, 2022.
- [10] A. Alnabsha, H. A. Abdou, C. G. Ntim, and A. A. Elamer, "Corporate boards, ownership structures and corporate disclosures: Evidence from a developing country," *J. Appl. Account. Res.*, vol. 19, no. 1, pp. 20–41, 2018, doi: 10.1108/JAAR-01-2016-0001.
- [11] N. O. D. Ellili, "Impact of corporate governance on environmental, social, and governance disclosure: Any difference between financial and non-financial companies?," *Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag.*, vol. 30, no. 2, pp. 858–873, 2023.
- [12] C. Mallin, G. Michelon, and D. Raggi, "Monitoring intensity and stakeholders' orientation: How does governance affect social and environmental disclosure?," *J. Bus. Ethics*, vol. 114, no. 1, pp. 29–43, 2013.
- [13] M. Arayssi, M. Jizi, and H. H. Tabaja, "The impact of board composition on the level of ESG disclosures in GCC countries," *Sustain. Accounting, Manag. Policy J.*, vol. 11, no. 1, pp. 137–161, 2020, doi: 10.1108/SAMPJ-05-2018-0136/FULL/XML.
- [14] M. Hida and H. Bassidi, "Impact of board composition on ESG disclosure practices: A literature review," *Int. J. Res. Econ. Financ.*, vol. 1, no. 3, pp. 44–55, 2024.
- [15] G. Gavana, P. Gottardo, and A. M. Moisello, "The impact of board gender diversity on ESG disclosure. A contingency perspective," *Meditari Account. Res.*, vol. 33, no. 7, pp. 1–29, 2024, doi: 10.1108/MEDAR-07-2024-2567.
- [16] S. Aprianti, D. Susetyo, I. Meutia, and L. L. Fuadah, "Audit Committee Characteristics and Sustainability Reporting in Indonesia," *Proc. 7th Sriwij. Econ. Accounting, Bus. Conf. (SEABC*

- 2021), vol. 647, no. 51, pp. 42–47, 2022, doi: 10.2991/aebmr.k.220304.006.
- [17] A. Buallay and J. Al-Ajmi, “The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council,” *J. Appl. Account. Res.*, vol. 21, no. 2, pp. 249–264, 2020.
- [18] C. Jimantoro, K. A. Maria, and D. Rachmawati, “Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan Environmental, Social, Governance,” *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 19, no. 1, pp. 31–52, 2023.
- [19] M. Arif, A. Sajjad, S. Farooq, M. Abrar, and A. S. Joyo, “The Impact of Audit Committee Attributes on the Quality and Quantity of Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosures,” *Corp. Gov.*, vol. 21, no. 3, pp. 497–514, 2020, doi: 10.1108/CG-06-2020-0243.
- [20] F. Anggraini, S. Helmi, and U. Bung, “J r a k,” vol. 15, no. 02, pp. 381–395, 2025, doi: 10.22219/jrak.v15i2.30189.
- [21] I. C. J. Edirisinghe and A. W. J. C. Abeygunasekera, “Impact of Audit Committee Attributes on ESG Disclosures: Evidence From Firms Listed in The Colombo Stock Exchange,” 2022.
- [22] R. E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, 1984.
- [23] R. M. Haniffa and T. E. Cooke, “The impact of culture and governance on corporate social reporting,” *J. Account. Public Policy*, vol. 24, no. 5, pp. 391–430, 2005, doi: 10.1016/J.JACCPUBPOL.2005.06.001.
- [24] M. Allegrini and G. Greco, “Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: Evidence from Italian listed companies,” *J. Manag. Gov.*, vol. 17, no. 1, pp. 187–216, 2013.
- [25] J. C. Chen and R. W. Roberts, “Toward a more coherent understanding of the organization–society relationship: A theoretical consideration for social and environmental accounting research,” *J. Bus. Ethics*, vol. 97, no. 4, pp. 651–665, 2010, doi: 10.1007/s10551-010-0531-0.
- [26] C. Deegan, *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Education, 2014.
- [27] M. C. Suchman, “Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches,” *Acad. Manag. Rev.*, vol. 20, no. 3, pp. 571–610, 1995, doi: 10.5465/amr.1995.9508080331.
- [28] G. Michelon, “Sustainability disclosure and reputation: A comparative study,” *Corp. Reput. Rev.*, vol. 14, no. 2, pp. 79–96, 2011, doi: 10.1057/crr.2011.10.
- [29] K. Menon and J. D. Williams, “The Use of Audit Committees for Monitoring,” *J. Account. Public Policy*, vol. 13, no. 2, pp. 121–139, 1994.
- [30] B. Xie, W. N. Davidson III, and P. J. DaDalt, “Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee,” *J. Corp. Financ.*, vol. 9, no. 3, pp. 295–316, 2003, doi: 10.1016/S0929-1199(02)00006-8.
- [31] M. C. Minutolo, W. D. Kristjanpoller, and J. Stakeley, “Exploring environmental, social, and governance disclosure effects on the S&P 500 financial performance,” *Bus. Strateg. Environ.*, vol. 28, no. 6, pp. 1083–1095, 2019, doi: 10.1002/bse.2303.
- [32] J. Xie, W. Nozawa, M. Yagi, H. Fujii, and S. Managi, “Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance?,” *Bus. Strateg. Environ.*, vol. 28, no. 2, pp. 286–300, 2019, doi: 10.1002/bse.2224.
- [33] H. Mukhibad, Kiswanto, and P. Y. Jayanto, “An analysis on financial and social performance of Islamic banks in Indonesia,” *Int. J. Monet. Econ. Financ.*, vol. 10, no. 3–4, pp. 295–308, 2017, doi: 10.1504/IJMEF.2017.087479.
- [34] E. Zachary, D. A. N. Keragaman, G. Di, D. Terhadap, and E. Zachary, “49315-114973-1-Sm,” vol. 14, no. April 2019, pp. 1–12, 2025.
- [35] G. Nicolò, G. Zampone, G. Sr, and A. Tiron Tudor, “Worldwide evidence of corporate governance influence on ESG disclosure in the utilities sector,” *Util. Policy*, vol. 82, p. 101549, 2023, doi: 10.1016/j.jup.2023.101549.
- [36] C. G. Raheja, “Determinants of board size and composition: A theory of corporate boards,” *J. Financ. Quant. Anal.*, vol. 40, no. 2, pp. 283–306, 2005, doi: 10.1017/s0022109000002313.
- [37] D. T. M. Butar-Butar, I. Itan, and A. G. Saragih, “Journal of accounting and business education,” *J. Account. Bus. Educ.*, vol. 5, no. June, pp. 67–77, 2025.
- [38] T. Nugroho and S. Utama, “Audit Committee and ESG Disclosure: Evidence from Indonesia,” *Asian J. Account. Res.*, vol. 6, no. 1, pp. 78–92, 2021.
- [39] T. K. Sari and Nadhira Fitriani, “How do board characteristics influence the ESG disclosure in Indonesia?,” *J. Akunt. Audit. Indones.*, vol. 27, no. 2, 2024, doi: 10.20885/jaai.vol27.iss2.art9.
- [40] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [42] C. Wegener and M. Schmidt, “Drivers of sustainability reporting: Evidence from Germany,” *Sustainability*, vol. 12, no. 22, p. 9511, 2020, doi: 10.3390/su12229511.
- [43] K. Hummel and C. Schlick, “The relationship between sustainability performance and sustainability disclosure – Reconciling voluntary disclosure theory and legitimacy theory,” *J. Account. Public Policy*, vol. 35, no. 5, pp. 455–476, 2016, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.001.

- [44] M. Habbash and S. Alghamdi, "The perception of corporate social responsibility and corporate social disclosure among Saudi managers," *J. Account. Emerg. Econ.*, vol. 6, no. 3, pp. 340–366, 2016, doi: 10.1108/JAEE-12-2013-0066.
- [45] P. Velte, "Does board composition have an impact on ESG disclosure? Evidence from European capital markets," *J. Clean. Prod.*, vol. 142, pp. 2828–2839, 2017.
- [46] S. Halid, R. Mahmud, M. T. M. Suffian, and R. Abdul, "Does Firm's Board Affects ESG? Malaysian Evidence," *Management*, vol. 12, no. 1, pp. 131–143, 2022.